

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2023



KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah berhasil kami susun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan serta sasaran mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan juga telah disinergikan dengan materi laporan pertanggung- jawaban Bupati Kebumen Tahun 2023. Data-data yang disajikan menggambarkan capaian kinerja yang ada di Kecamatan Buayan Tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Buayan yang dapat kami sampaikan, kami menyadari bahwa laporan ini sepenuhnya belum sempurna, karena itu saran dan kritik kami terima agar yang akan datang lebih baik dan semoga LkjIP ini dapat menjadi masukan, bahan perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memberikan manfaat di masa mendatang.

CAMAT BUAYAN

NUR WAHYUDI, SH
Penata Tk.I
NIP 19800110 201101 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis	3
1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Perencanaan Strategis	16
2.1.1. Rencana Strategis	17
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	21
2.2. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	38
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	38
4.2. Permasalahan / Kendala	39
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	40

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Prestasi yang telah di capai Tingkat Provinsi atau Nasional
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buayan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Disamping untuk mewujudkan administrasi Pemerintah yang mampu mendukung kelancaran serta ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat.

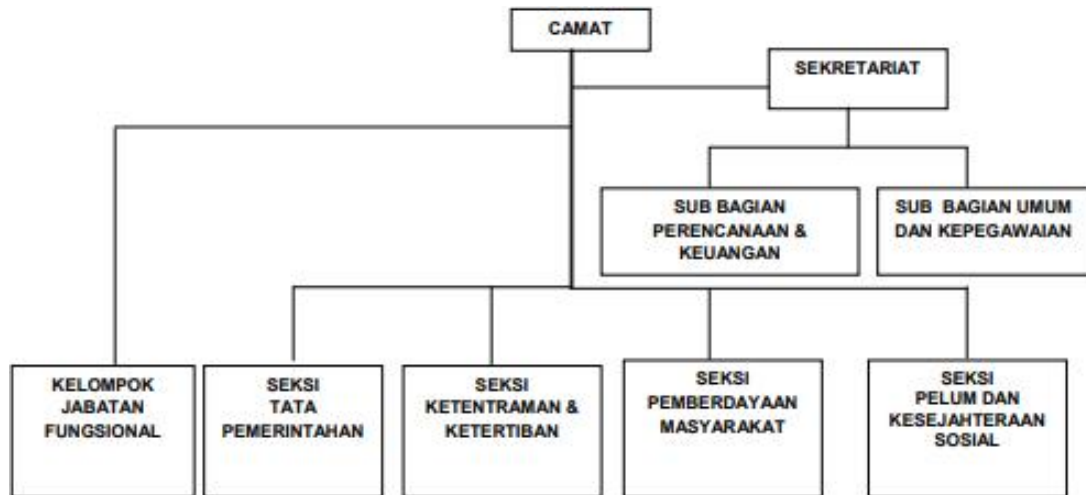
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Buayan berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada, maka ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Buayan yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program Strategis OPD Kecamatan Buayan merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir Tahun Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Kecamatan Buayan sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun LKjIP tahun 2023. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi

serta TataKerja Kecamatan Struktur Organisasi Kecamatan Buayan sebagai bagan sebagai berikut :

Bagan1.1
StrukturOrganisasiKecamatanBuayan



Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang SOTK, Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan, 2 (dua) orang Kasubag, 4 (empat) orang Kasi, 4 (empat) orang staf Kecamatan dan ditambah 4 (empat) orang P2K (Tenaga Harian Lepas).

Tabel. 1.1

No.	Jabatan	
1.	Pimpinan	: Camat
2.	Sekretaris Kecamatan	: - Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian - Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3.	Kepala Seksi	: - Ka.Seksi Tata Pemerintahan - Ka.Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Ka.Seksi Tata Pemerintahan - Ka.Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Ka.Seksi Pelayanan Umum dan Kesos - Ka.Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4.	Staf	: - 4 (empat) orang staf Kecamatan - 4 (empat) orang Tenaga Harian Lepas

I.2 Fungsi Strategis

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Sedang untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Buayan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
9. Perencanaan, Pengoordinasian, Pengendalian dan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan Evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan
12. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;

I. Susunan Organisasi di Kecamatan Buayan

- (1) Camat

- (2) Sekretariat terdiri atas :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Seksi Tata Pemerintahan
- (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- (5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- (6) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan .

II. SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
2. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana , keuangan , kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
4. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
5. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
7. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

8. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
9. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
10. koordinasikan dengan organisasi perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
13. pelaksanaan tugas koordinasi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat Kecamatan membawahi :

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan .

III. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;.
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan ditingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan ditingkat Kecamatan;

- j. penyusunan program, penyelenggara, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka

agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayahKecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi denganperangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud dalam Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pematapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan /atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;

- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

VI. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;

- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

I.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Sumber daya manusia di Kecamatan Buayan kondisi pada akhir tahun 2023 sebanyak 16 (Enam belas) dengan perincian 12 (Empat belas) PNS dan 4 (empat) Non PNS.

a. Sumber Daya (PNS Menurut Jabatan)

No.	Jabatan	Jumlah	
1.	Struktural		
	a. Camat (Eselon III.a)	1	
	b. Sekretaris (Eselon III.b)	1	
	c. Kepala Seksi (Eselon IV.a)	4	
	d. Kasubbag (Eselon IV.b)	2	
2.	Staf Kecamatan PNS	a. Staf Administrasi	4
3.	Non PNS	a. Staf Kecamatan	4
Jumlah			16

b. Jumlah PNS Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	6
3.	Golongan II	2
4.	Golongan I	0
5.	Non PNS / P2K	4
Jumlah		16

c. Jumlah PNS Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-II	2
2	S-I	8
3	D-III	0
4	SLTA	2
5	SLTP	0
6	SD	0
Non PNS		
7	S-I	2
8	SLTA	2
Jumlah		16

Dengan struktur organisasi tersebut diatas, dengan jumlah personil sejumlah 16 (enam belas) orang dirasakan belum sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk jumlah mendekati sesuai dengan beban kerja adalah 22 (dua puluh dua) personil dengan rincian : 4 seksi x 2 staf = 8 orang, 2 orang bendahara,

3 orang (operator KK, KTP, verifikator) 2 orang pelayanan administrasi umum, 2 orang penjaga malam dan kebersihan.

Jadi kondisi yang diharapkan jumlah personil adalah:Struktural sebanyak 8 orang, Staf PNS sebanyak 13 orang, Staf Non PNS sebanyak 4 orang. Jumlah seluruhnya sebanyak 25 (dua puluh lima) personil.

Terutama untuk tenaga IT sangat kurang dan verifikator belum ada, dengan kondisi saat ini untuk personil di Kecamatan Buayan tahun 2023 ini pensiun 3 orang, dan sebagian sudah mendekati batas usia pensiun, sedangkan Tenaga Kesos saat ini kondisi kesehatan sedang sakit, untuk usulan kami sudah membuat bezetting / formasi sesuai dengan beban kerja dan mengusulkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kecamatan Buayan memiliki sarana dan prasarana yaitu :

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan roda 4	1	Baik
2.	Kendaraan roda 2	16	3 baik 13 sedang
3.	Komputer yang dapat digunakan	3	2 baik 1 rusak
4.	Laptop yang dapat digunakan	11	8 baik 3 rusak
5.	AC yang dapat digunakan	4	3 baik 1 kurang baik
6.	Printer	6	4 baik 2 sedang
7.	Kursi rapat	95	85 baik 10 sedang
8.	Kursi kantor	20	20 baik
9.	Kursi tamu	1	1 baik
10.	LCD Proyektor	2	2 sedang
11.	Sound system	1	1 rusak berat
12.	Sound system TOA	3	2 baik 1 rusak berat
13.	Amplifier	12	12 baik
14.	Meja rapat	21	19 baik 2 sedang
15.	Televisi	3	2baik 1 sedang
16.	Meja ½ biro	1	1 sedang
17.	Gedung	1	1 rusak
18.	Rumah Dinas	1	1 sedang

Dari tabel diatas kondisi sarpras Kecamatan Buayan ada beberapa hal antara lain:

- a. rumah dinas mendesak untuk segera direhab / di renovasi , namun tertunda selama 2 tahun karena adanya covid-19, dan penggunaan dana tahun ini untuk pengentasan bantuan stunting dan permakanan balita dan lansia, harapannya untuk tahun kedepan ada kenaikan pagu indikatif kecamatan.
- b. belum adanya garasi untuk mobil dinas , dikarenakan tempat parkir mobil untuk kondisi sekarang digunakan sebagai tempat pelayanan masyarakat (PATEN) yang digunakan tambahan ruang tunggu serta ruang laktasi , sementara ini untuk garasi menempati di depan rumah dinas Camat .
- c. belum diplafonnya ruang pertemuan PKK , sehingga untuk pelaksanaan rapat-rapat kurang begitu nyaman (ada AC tapi belum di plafon), dan saat ini ruangan tersebut sedang digunakan untuk Tenaga Pendamping Kabupaten maupun Pendamping Desa Lokal (baik PM maupun Kesos).
- d. belum adanya khusus ruang arsip yang memadai, sementara ini untuk ruang arsip menempati di belakang gedung kantor .

I.5. Kekuatan Sumber Daya yang Ada

1. Geografis / Administrasi

Kecamatan Buayan merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Kebumen. Dengan luas wilayah 6.842.129 km² yang secara administrasi terdiri dari 20 (dua puluh) desa. Dengan batas-batas Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Sempor
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Ayah dan Kecamatan Rowokele
- Sebelah Timur : Kecamatan Kuwarasan

2. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Buayan adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan

perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Buayan hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam.

3. Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) Kecamatan Buayan sangat potensial adalah lahan pertanian, Sedang potensi yang dapat dikembangkan adalah pembuatan produk gula semut serta makanan tradisional seperti emping, sriping, sale pisang dll. Disamping itu untuk peningkatan perekonomian masyarakat maka Kecamatan Buayan di pusatkan sebagai daerah sentra buah-buahan (alpokat, durian, mangga, kelengkeng , anggur) dengan buah alpokat sebagai icon Kecamatan Buayan.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah potensi sumber daya yang tersedia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan. Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 .

II.1.1 VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun visi Kabupaten Kebumen adalah dari “ ***Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*** “

Kecamatan Buaya yang merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016, sehingga untuk mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam mewujudkan dan mensukseskan visi misi Bupati Kebumen.

Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan jangka menengah Kecamatan adalah misi ke 1 (satu) yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov yang terintegrasi” yang di implementasikan melalui program dan kegiatan.

II.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun serta merupakan suatu penjabaran dari pernyataan visi misi organisasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurunwaktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Buayan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

II.1.3. STRATEGI

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

a. STRATEGI

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran di Kecamatan Buayan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP pelayanan Kecamatan;
2. Meningkatkan kualitas SDM dan aparatur Pemerintah;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial masyarakat dan kegiatan pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk potensi infrastruktur dasar;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
7. Melaksanakan Paten secara optimal

b. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan

guna mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun kebijakan Kecamatan Buayan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dukungan administrasi
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan
3. Pengembangan data base kecamatan
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah dan Lembaga Desa
5. Peningkatan koordinasi pembangunan di wilayah

c. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak (action play) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran. Sesuai dengan Renstra Kecamatan Buayan program yang dilaksanakan Kecamatan Buayan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

d. KEGIATAN TAHUN 2023

Kecamatan Buayan pada Tahun 2023 melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

e. SUB KEGIATAN TAHUN 2023

Kecamatan Buayan pada tahun 2023 melaksanakan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
4. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan bahan logistik kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan bahan Material
9. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

12. Penyediaan jasa surat menyurat
13. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
15. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
16. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
17. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terakit dengan Nonperizinan
18. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia
19. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
20. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
21. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
22. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
23. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
24. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
25. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

II.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang

menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Tabel 2.1

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buayan
Tahun 2021 - 2026**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,92	84,00	85,50	86,75	87,50	88,75	90,00	90,00
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	84,00	85,00	85,50	86,75	87,50	88,75	90,00	90,00

Tabel 2.2

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
I	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terselenggaranya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	B	%
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11	Dokumen
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5	Dokumen
	b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	6	Dokumen
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan serta tamsil	14	Orang
	b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun,	4	Dokumen
	3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100	%

	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit /jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	Jenis
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
	d. Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan
	e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12	Bulan
	f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan
	g. Sub kegiatan penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan fasilitas arsip kantor	12	Bulan
	4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100	%
	a. Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	12	Bulan
	6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	10	Unit
	b. Sub kegiatan peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	3	Unit
	c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6	Unit
	d. Sub kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2	unit
II	B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	%
	1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase terlaksananya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepacamat	86	%
	a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan nonperizinan yang dilaksanakan	5	Jenis

III	C. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks konduktivitas Kecamatan	100	%
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100	%
	a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2	Kegiatan
IV	D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan Indeks Desa Membangun	100	%
	1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	7	Kegiatan
	a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	Desa
	b. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20	Desa
	c. Sub Kegiatan Fasilitas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitas dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	3	Desa
	d. Sub Kegiatan Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban	Jumlah kegiatan fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1	Kegiatan
	e. Sub Kegiatan Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2	Kegiatan
	f. Sub Kegiatan fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	Kegiatan
	g. Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes dan Sembako)	Jumlah kegiatan Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes dan Sembako)	23	Kegiatan

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BUAYAN

TUJUAN	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGI/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN (X 100 %)	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Dihitung dengan survey yang dilakukan Kabupaten	Kantor Camat Buayan	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

II.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Buayan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Kecamatan Buayan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan / celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya. Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat,

sehingga belum dilaporkan dalam LkjiP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program / kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65% sd 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% sd 60%	Kurang (K)
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	86,75	92,37	106,47%

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 - 2,599	25,00 - 64,99	D	Tidakbaik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

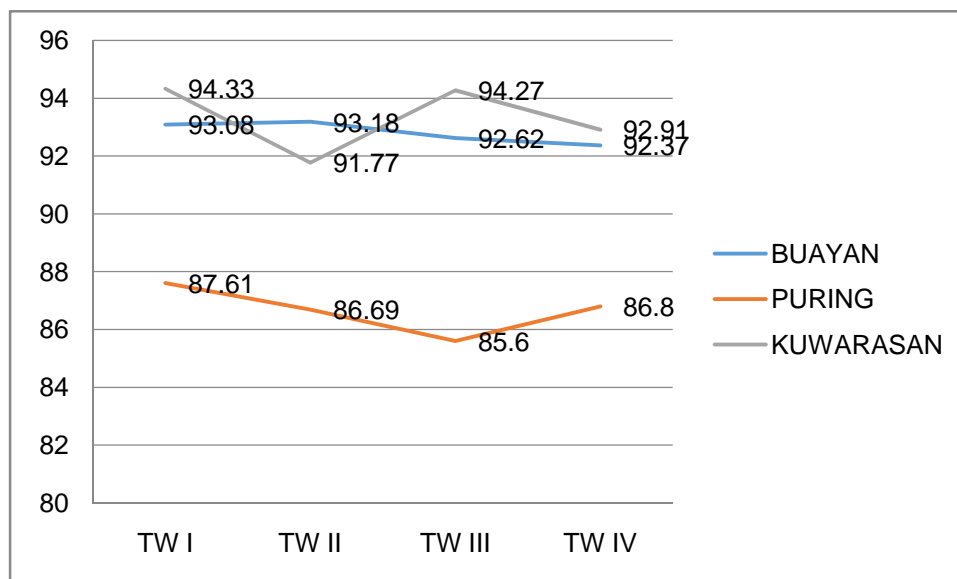
Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,50	86,75	92,37	106,47%	90	102,26%

Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



IKM Triwulanan Kecamatan Buayan jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Kuwarasan dan Kecamatan Puring Tahun 2023 lebih tinggi pada Triwulan II. Lebih rendah dari IKM Kecamatan Kuwarasan pada Triwulan I, III, dan IV. Lebih tinggi dari IKM Kecamatan Puring pada Triwulan I s.d IV. Namun demikian realisasi IKM masih di atas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Sangat Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Buayan, Kecamatan Kuwarasan dan Kecamatan Puring Tahun 2023

No.	Unsur	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		BYN	KWRSN	PRG	BYN	KWRSN	PRG	BYN	KWRSN	PRG	BYN	KWRSN	PRG
1	Persyaratan	93.27	90.26	84.31	93.92	91.97	83.23	94.72	94.65	82.89	92.35	92.33	82.61
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	92.37	93.25	85.65	91.72	91.76	85.97	92.31	95.6	81.44	90.45	92.17	84.68
3	Waktu Pelayanan	90.67	94.4	82.99	92.94	91.21	84	90.51	94.64	80.9	86.51	92.48	85.28
4	Biaya/Tarif	100	99.63	98.68	99.74	99.56	99.66	100	99.76	100	97.95	99.61	99.38
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	94.11	94.91	85.42	94.24	90.49	85.65	94.26	95.55	84.78	93.07	93.37	83.67
6	Kompetensi Pelaksana	90.78	95.66	86.62	93.66	90.25	84.34	90.37	94.51	82.65	92.44	93.1	85.44
7	Perilaku Pelaksana	93.19	95.69	85.4	93.4	89.72	81.4	93.8	94.74	82.36	93.81	93.55	82.86
8	Sarana dan	92.25	96.74	87.71	93.55	90.01	84.08	92.55	94.18	83.16	94.97	93.15	85.14
9	Penanganan Pengaduan	99.51	97.02	99.72	93.92	99.35	99.78	93.52	93.41	100	98.21	94.92	100
Jumlah		93.08	94.33	87.61	93.18	91.77	86.69	92.62	94.27	85.6	92.37	92.91	86.8

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Buayan rata-rata kategori **Sangat Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian dan Kompetensi Pelaksana.

Dari data pada tabel di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

-) Dilaksanakannya Rapat Koordinasi PATEN dengan Desa terkait Sistem, Mekanisme, dan Prosedur terkait PATEN
-) Nomor Layanan Masyarakat Kecamatan Buayan untuk mempermudah informasi terkait mekanisme dan prosedur.
-) mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, mediasosial (facebook dan instagram).

2. Waktu Penyelesaian

-) Berkoordinasi dengan Disdukcapil Kebumen terkait verifikasi dan Sertifikasi TTE penerbitan dokumen
-) SOP terkait PATEN yang berisi tentang jangka waktu penyelesaian maksimal 1 hari kerja setelah berkas diterima.

3. Kompetensi Pelaksana

-) Rapat Koordinasi Operator oleh Disdukcapil untuk peningkatan kompetensi
-) Penyelenggaraan pelatihan service excellence (pelayanan prima) terhadap seluruh pegawai, baik yang terlibat langsung pemberian pelayanan kepada publik maupun pegawai yang tidak terlibat secara langsung dalam pemberian pelayanan kepada publik.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buayan	106,47%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlahbulan Administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
			Administrasi UmumPerangkat Daerah	Jumlahbulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barangmilik daerah	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlahbulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	100%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusifitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai PenugasanKepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa dengan IndeksDesa	100%	Menunjang

			Pemerintahan Desa	Membangun Kategori Maju dan Mandiri		
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100%	Menunjang
Rata-rata					100%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Efisiensi Anggaran
Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	86,75	92,37	106,47				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	86,75	92,37	106,47%	2.053.582.307	2.053.582.307	92,93%	8,0%

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kegiatan Fisik
Kecamatan Buayan tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATORPROGRAM /KEGIATAN	TARGETKINERJA DAN ANGGARAN RENJASKPD TAHUN 2023		REALISASICAPAIAKINERJADAN ANGGARANRENJA SKPDYANG DIEVALUASI		(%)
I	ProgramPenunjang UrusanPemerintahan DaerahKabupaten/Kota	CakupanPelayanan Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	85	1.836.034.307	85	1.836.034.307	100
	<i>KegiatanPerencanaan, Penganggaran,dan EvaluasiKinerjaPerangkat Daerah</i>	<i>JumlahDokumen Perencanaan dan EvaluasiKinerja PerangkatDaerah</i>	11	<i>4.050.000</i>	11	<i>4.050.000</i>	100
	SubKegiatanPenyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	Jumlahdokumen renstra dan renjayang disusun (Renja, RKA,DPA,DPPA, RKAP)	5	1.550.000	5	1.550.000	100
	SubKegiatanEvaluasi KinerjaPerangkatDaerah	JumlahDokumen EvaluasiPerangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev,)	6	2.500.000	6	2.500.000	100
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah bulan penyediaanadminstrasikeuangan PerangkatDaerah</i>	12	<i>1.741.039.307</i>	12	<i>1.741.039.307</i>	100
	SubKegiatanPenyediaan Gajidan TunjanganASN	JumlahASNyang mendapatkanGajidan Tunjangan dan yang mendapatkanTamsil	14	1.727.957.307	16	1.727.957.307	100
	SubKegiatanPelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD	JumlahDokumen pengelolaanadministrasi keuangan(TU,GU,LS,UP)	4	13.082.000		13.082.000	100

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	1.262.000	12	1.262.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	1.262.000	4	1.262.000	100
	SubKegiatanPenyediaan BahanLogistikKantor	Jumlahbulanpenyediaan makanan dan minuman	12	8.860.000	12	8.860.000	100
	SubKegiatanPenyediaan BarangCetakandan Penggandaan	Jumlahbulanpenyediaan barangcetakan dan penggandaan	12	1.601.000	12	1.601.000	100,
	SubKegiatanPenyediaan Bahan/Material	Jumlahbulanpenyediaan alat tulis kantor	12	5.000.000	12	5.000.000	100
	SubKegiatan PenyelenggaraanRapat KoordinasidanKonsultasiSKPD	Jumlahbulanrapat-rapat dan konsultasiKeluar daerah	12	1.480.000	12	1.480.000	100
	BelanjaAlatTulisKantor KegiatanPenyimpanan Arsip	Jumlahbulan penatausahaan arsip dinamis	12	1.492.000	12	1.492.000	100
	<i>KegiatanPengadaan BarangMilikDaerah penunjangUrusan PemerintahDaerah</i>	<i>JumlahUnit Pengadaan BarangMilik Daerah</i>		12.000.000		12.000.000	100
	<i>KegiatanPenyediaanJasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah</i>	<i>JumlahbulanPenyediaan JasaPenunjang PemerintahanDaerah</i>	12	32.750.000	12	32.750.000	100
	SubKegiatanPenyediaan JasaSuratMenyurat	Jumlahbulanpenyediaan surat menyurat	12	550.000	12	550.000	100
	Sub KegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi,Sumber dayaAirdan Listrik	Jumlahbulanpenyediaan jasaKomunikasi,sumber dayaairdan listrik	12	17.000.000	12	17.000.000	100
	SubKegiatanPenyediaan JasaPelayananUmumKantor	Jumlahbulanpenyediaan jasaKebersihankantor	12	15.200.000	12	15.200.000	100
	<i>KegiatanPemeliharaan BarangMilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah</i>	<i>JumlahUnit Pemeliharaan BarangMilik Daerah</i>	12	26.500.000	12	26.500.000	100
	SubKegiatanPenyediaan JasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan PerizinanKendaraanDinas OperasionalatauLapangan	Jumlahpaket penyediaan jasaPemeliharaan, biayapemeliharaanPajakdan perizinanKendaraan dinasoperasional	12	24.500.000	12	24.472.927	100

	SubKegiatanPemeliharaan PeralataandanMesin Lainnya	Jumlahunit pemeliharaanperalatan dan mesinlainnya	12	2.000.000	12	2.000.000	100,
	ProgramPenyelenggaraan PemerintahanDan PelayananPublik	Indeks Kepuasan Masyarakatterhadap PelayananPublik		55.370.000		55.370.000	100
	<i>KegiatanPelaksanaan UrusanPemerintahan yang DilimpahkankepadaCamat</i>	<i>Jumlahurusan pemerintahn yang dilimpahkan kepada camat</i>	5	55.370.000	5	55.370.000	100
	SubKegiatanPelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdenganPelayanan PerizinanNon Usaha	Jumlahpelayanan perijinanyang dilaksanakan(KTP, KK, KartuKelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, L	5	55.370.000	5	55.370.000	100
	ProgramPenyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	7.000.000	100	7.000.000	100
	<i>KegiatanPenyelenggaraan UrusanPemerintahan UmumsesuaiPenugasan KepalaDaerah</i>	<i>JumlahKegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah</i>	100	7.000.000	100	7.000.000	100
	SubKegiatanPembinaan Wawasan Kebangsaandan KetahananNasionaldalam rangkaMemantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUUDRItahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggalkaserta Pemertahanandan PemeliharaanKeutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangkaHUTRIDan hari Jadi Kebumen	2	7.000.000	100	7.000.000	100
	ProgarmPembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	PersentaseDesadengan IndeksDesaMembangun KategoriMajudan Mandiri		155.178.000	82	155.178.000	100
	SubKegiatanFasilitasi PengelolaKeuanganDesa danPendayagunaanAset Desa	Jumlahdesayang terfasilitasipengelolaan keuangan desadandendayagunaan aset desa	20	31.529.000	20	31.529.000	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Peangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	20	3.650.000	20	3.650.000	100
	SubKegiatanFasilitasi Penyelenggaraan	Jumlahkegiatanfasilitasi penyelenggaraan	1	5.000.000	1	5.000.000	100

	Ketentramandan Ketertiban Umum	ketentrandan ketertiban umum					
	SubKegiatanFasilitasi PenyusunanPerencanaan PembangunanPartisipatif	JumlahKegiatan FasilitasiPenyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam	1	8.000.000		8.000.000	100
	SubKegiatanFasilitasi PenyusunanProramdan Pelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Desa	JumlahKegiatan Pemberdayaan MasyarakatDesa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat)	4	99.914.000	4	99.914.000	100
	SubKegiatanKordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya	Jumlahfasilitasikegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/keldan Bansos)	2	4.250.000	2	4.250.000	100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 8,0% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s/d akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 92,37 atau capaian kinerja sebesar 106,47% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 92,93% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2023 (92,37) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (92,22) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel lebih banyak serta penilaian masyarakat terhadap pelayanan lebih baik.

1.2. Permasalahan / Kendala

Unsur Prioritas dari Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Pelayanan Publik adalah faktor penting yang utama dalam memfasilitasi Masyarakat, didalam pelayanan ada permasalahan atau kendala yang dihadapi bidang pelayanan:

1. Jaringan Internet sering down sehingga menghambat penerbitan dokumen kependudukan.
2. Dengan adanya wajib aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi pemohon yang ingin mencetak KTP-el, membuat antrian menumpuk karena proses registrasi hingga berhasil aktivasi memakan waktu kurang lebih 5 menit.
3. Pengaduan Masyarakat kondisi lebih darurat sering tidak terima bantuan sosial pada umumnya mengeluhkan mekanisme penyaluran disebabkan karena pemutakhiran data yang tidak dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi.

1.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

IKM Kecamatan Buayan rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, dan Kompetensi Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

a. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

-) Dilaksanakannya Rapat Koordinasi PATEN dengan Desa terkait Sistem, Mekanisme, dan Prosedur terkait PATEN
-) Nomor Layanan Masyarakat Kecamatan Buayan untuk mempermudah informasi terkait mekanisme dan prosedur.
-) Mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, mediasosial (facebook dan instagram).

b. Waktu Penyelesaian

-) Berkoordinasi dengan Disdukcapil Kebumen terkait Verifikasi dan Sertifikasi TTE penerbitan dokumen.
-) SOP terkait PATEN yang berisi tentang jangka waktu penyelesaian maksimal 1 hari kerja setelah berkas diterima.

c. Kompetensi Pelaksana

-) Rapat Koordinasi Operator oleh Disdukcapil untuk peningkatan kompetensi.
-) Penyelenggaraan pelatihan service excellence (pelayanan prima) terhadap seluruh pegawai, baik yang terlibat langsung pemberian pelayanan kepada publik maupun pegawai yang tidak terlibat secara langsung dalam pemberian pelayanan kepada public.

LKjIP Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

Kebumen, 22 Januari 2024

CAMAT BUAYAN

NUR WAHYUDI, SH
Penata Tk.I
NIP 19800110 201101 1 006

KECAMATAN BUAYAN

Jumlah DPA		25
Total Pagu		2,053,582,307
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,836,034,307
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,050,000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,550,000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,500,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,741,039,307
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,727,957,307
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13,082,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19,695,000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,262,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,860,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,601,000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,480,000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,492,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,000,000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,750,000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15,200,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,500,000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24,500,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55,370,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	55,370,000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	55,370,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,000,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7,000,000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	7,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	155,178,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	155,178,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	31,529,000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,650,000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2,280,000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,280,000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8,275,000
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	99,914,000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4,250,000

CAMAT BUAYAN

NUR WAHYUDI, SH
 Penata Tk.I
 NIP 19800110 201101 1 006

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BUAYAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI		DEVIASI		IDENTIFIKASI	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN INI (%)	KEU SPJ (%)	FISIK (%)	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI		
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	(Rp)						(%)	
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,836,034,307		1,836,034,307	100	100	1,641,803,262	51,002,985	1,692,806,247	92.2	100	7.8	0			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,050,000		4,050,000	100	100	4,047,400		4,047,400	99.94	100	0.06	0			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,550,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1,550,000	100	100	1,549,000		1,549,000	99.94	100	0.06	0			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,500,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2,500,000	100	100	2,498,400		2,498,400	99.94	100	0.06	0			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,741,039,307		1,741,039,307	100	100	1,555,676,872	43,711,838	1,599,388,710	91.86	100	8.14	0			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,727,957,307	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1,727,957,307	100	100	1,542,800,377	43,530,002	1,586,330,379	91.8	100	8.2	0	Adanya kekosongan		
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13,082,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	13,082,000	100	100	12,876,495	181,836	13,058,331	99.82	100	0.18	0			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19,695,000		19,695,000	100	100	18,500,700	1,069,700	19,570,400	99.37	100	0.63	0			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,262,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1,262,000	100	100	1,055,400	206,100	1,261,500	99.96	100	0.04	0			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,860,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8,860,000	100	100	8,820,000		8,820,000	99.55	100	0.45	0			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,601,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1,601,000	100	100	1,567,000	33,500	1,600,500	99.97	100	0.03	0			
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5,000,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5,000,000	100	100	4,160,100	830,100	4,990,200	99.8	100	0.2	0			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,480,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1,480,000	100	100	1,480,000		1,480,000	100	100	0	0			
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,492,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1,492,000	100	100	1,418,200		1,418,200	95.05	100	4.95	0			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,000,000		12,000,000	100	100	11,880,000		11,880,000	99	100	1	0			
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,000,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12,000,000	100	100	11,880,000		11,880,000	99	100	1	0			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,750,000		32,750,000	100	100	27,199,461	4,257,349	31,456,810	96.05	100	3.95	0			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	550,000	100	100	440,000	110,000	550,000	100	100	0	0			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,000,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17,000,000	100	100	14,098,061	1,609,149	15,707,210	92.4	100	7.6	0	Bersifat tagihan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15,200,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15,200,000	100	100	12,661,400	2,538,200	15,199,600	100	100	0	0			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	26,500,000		26,500,000	100	100	24,498,829	1,964,098	26,462,927	99.86	100	0.14	0			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24,500,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	24,500,000	100	100	22,508,829	1,964,098	24,472,927	99.89	100	0.11	0			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,000,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2,000,000	100	100	1,990,000		1,990,000	99.5	100	0.5	0			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	55,370,000		55,370,000	100	100	47,781,950	7,126,800	54,908,750	99.17	100	0.83	0			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	55,370,000		55,370,000	100	100	47,781,950	7,126,800	54,908,750	99.17	100	0.83	0			
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	55,370,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	55,370,000	100	100	47,781,950	7,126,800	54,908,750	99.17	100	0.83	0			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,000,000		7,000,000	100	100	6,977,800	20,000	6,997,800	99.97	100	0.03	0			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	7,000,000		7,000,000	100	100	6,977,800	20,000	6,997,800	99.97	100	0.03	0			
7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	7,000,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7,000,000	100	100	6,977,800	20,000	6,997,800	99.97	100	0.03	0			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	155,178,000		155,178,000	100	100	149,662,950	4,149,000	153,811,950	99.12	100	0.88	0			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	155,178,000		155,178,000	100	100	149,662,950	4,149,000	153,811,950	99.12	100	0.88	0			
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	31,529,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	31,529,000	100	100	27,750,350	3,354,000	31,104,350	98.65	100	1.35	0			
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,650,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3,650,000	100	100	3,648,000		3,648,000	99.95	100	0.05	0			
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2,280,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2,280,000	100	100	2,277,800		2,277,800	99.9	100	0.1	0			
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,280,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5,280,000	100	100	5,240,100		5,240,100	99.24	100	0.76	0			
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8,275,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8,275,000	100	100	8,274,000		8,274,000	99.99	100	0.01	0			
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	99,914,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	99,914,000	100	100	98,224,100	795,000	99,019,100	99.1	100	0.9	0			
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4,250,000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4,250,000	100	100	4,248,600		4,248,600	99.97	100	0.03	0			
JUMLAH		2,053,582,307		2,053,582,307	900	900	1,846,225,962	62,298,785	1,908,524,747	92.93	100	100	100			

**REALISASI KINERJA KEUANGAN KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN TA 2023**

No	Kode	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Bulan												PROSEN	KET.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,836,034,307	130,470,388	215,924,317	473,344,649	631,757,515	774,797,563	903,686,784	1,114,913,456	1,301,908,566	1,350,222,567	1,535,898,379	1,641,803,262	1,692,806,247	92.19	
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,050,000	0	509,200	509,200	509,200	1,645,200	1,753,200	3,405,600	4,047,500	4,047,400	4,047,400	4,047,400	4,047,400	99.93	
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,741,039,307	129,230,719	206,326,575	460,023,411	612,107,951	734,855,078	855,510,546	1,056,835,231	1,235,406,451	1,279,882,529	1,454,169,898	1,555,676,872	1,599,388,710	91.86	
3	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19,695,000	0	3,587,600	3,587,600	3,587,600	5,317,900	8,369,900	10,819,900	13,732,500	13,732,500	18,500,700	18,500,700	19,570,400	99.36	
4	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,000,000	0	0	0	0	11,880,000	11,880,000	11,880,000	11,880,000	11,880,000	11,880,000	11,880,000	11,880,000	99	
5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,750,000	1,239,669	3,660,916	4,789,412	8,863,038	11,614,659	14,488,612	16,938,199	19,584,214	21,799,237	24,587,472	27,199,461	31,456,810	96.05	
6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,500,000	0	1,840,026	4,435,026	6,689,726	9,484,726	11,684,526	15,034,526	17,257,901	18,880,901	22,712,909	24,498,829	26,462,927	99.86	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55,370,000	0	6,648,900	6,648,900	13,337,650	16,691,650	21,807,650	25,161,650	33,089,650	36,443,650	44,427,950	47,781,950	54,908,750	99.16	
7	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	55,370,000	0	6,648,900	6,648,900	13,337,650	16,691,650	21,807,650	25,161,650	33,089,650	36,443,650	44,427,950	47,781,950	54,908,750	99.16	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,997,800	6,997,800	6,997,800	6,977,800	6,997,800	99.96	
8	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,997,800	6,997,800	6,997,800	6,977,800	6,997,800	99.96	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	155,178,000	0	7,491,000	79,809,000	91,562,000	94,088,700	105,915,200	112,646,933	127,995,200	131,950,000	137,011,800	149,662,950	153,811,950	99.11	
9	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	155,178,000	0	7,491,000	79,809,000	91,562,000	94,088,700	105,915,200	112,646,933	127,995,200	131,950,000	137,011,800	149,662,950	153,811,950	99.11	
TARGET KINERJA FISIK			2,053,582,307	130,470,388	230,064,217	559,802,549	736,657,165	885,577,913	1,031,409,634	1,252,722,039	1,469,991,216	1,525,614,017	1,724,335,929	1,846,225,962	1,908,524,747	92.93	


CAMAT BUAYAN
NUR WAHYUDI, SH
 Penata Tk.I
 NIP 19800110 201101 1 006

**TARGET KINERJA FISIK KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN TA 2023**

No	Kode	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Bulan												Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,836,034,307	12.79	20.91	33.56	43.88	52.07	60.37	75.98	83.8	86.43	93.06	98.77	100	
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,050,000	12.57	31.73	60.21	60.21	62.88	96.58	99.96	99.96	99.96	99.96	99.96	100	
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,741,039,307	13.11	21.21	34.17	43.96	52.08	60.27	76.43	84.36	86.74	93.26	98.94	100	
3	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19,695,000	9.53	22.82	24.57	37.11	48.07	61.99	67.1	71.7	84.4	94.49	99.93	100	
4	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,000,000	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,750,000	7.88	16.73	24.6	32.81	41.73	49.93	57.8	66.6	74.8	83.28	92.13	100	
6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,500,000	5.89	12.53	22	29.13	44.04	55.05	60.94	67.96	73.85	87.06	94.07	100	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55,370,000	12.01	18.64	25.95	33.03	40.59	52.09	59.18	66.28	73.66	86.4	93.94	100	
7	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	55,370,000	12.01	18.64	25.95	33.03	40.59	52.09	59.18	66.28	73.66	86.4	93.94	100	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	99.99	99.99	99.99	99.99	100	
8	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	99.99	99.99	99.99	99.99	100	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	155,178,000	6.79	33.55	60.19	62.15	66.96	72.1	78.67	84.14	88.67	89.85	98.91	100	
9	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	155,178,000	6.79	33.55	60.19	62.15	66.96	72.1	78.67	84.14	88.67	89.85	98.91	100	
TARGET KINERJA FISIK			2,053,582,307													


CAMAT BUAYAN
NUR WAHYUDI, SH
 Penata Tk.I
 NIP 19800110 201101 1 006